

EFEKTIVITAS KINERJA TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH (PPATS) PROVINSI SULAWESI SELATAN

Mutmainnah Nur Aldin¹, Frida Chairunisa², Wahyu Nurdiansyah N³

^{1,2,3}Politeknik STIA LAN Makassar

e-mail: andi_fadin@yahoo.com wahyu.nurdiansyah28@gmail.com fchairunisa@yahoo.com

ABSTRAK

Permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Sulawesi Selatan masih menjadi isu krusial yang dipicu oleh faktor ekonomi, sosial-budaya, dan terbatasnya akses pendidikan, sehingga berdampak pada tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kinerja Tim Koordinasi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS) dalam upaya menurunkan angka ATS melalui strategi reintegrasi pendidikan. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di kabupaten/kota dengan prevalensi ATS tertinggi, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen strategis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun tim PPATS telah berhasil mengembangkan inovasi sistem pendataan melalui aplikasi PASTI BERAksi, efektivitas kinerjanya masih belum optimal. Kendala utama terletak pada proses verifikasi dan validasi data yang terhambat akibat tidak tersedianya anggaran honorarium bagi petugas lapangan serta belum terintegrasinya program secara penuh dalam Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) daerah. Simpulan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan penanganan ATS memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor, dukungan anggaran yang memadai, serta integrasi kebijakan yang lebih solid untuk menjamin keberlanjutan program pengembalian anak ke bangku sekolah.

Kata Kunci: *Efektivitas Kinerja Tim, Penanganan Anak Tidak Sekolah*

ABSTRACT

The problem of out-of-school children (OTS) in South Sulawesi remains a crucial issue, driven by economic, socio-cultural factors, and limited access to education, resulting in high unemployment and poverty rates. This study aims to evaluate the effectiveness of the Coordination Team for the Acceleration of Handling Out-of-School Children (PPATS) in its efforts to reduce the number of out-of-school children through educational reintegration strategies. Using qualitative methods with a case study approach in districts/cities with the highest prevalence of out-of-school children, data collection was conducted through in-depth interviews, participant observation, and strategic document analysis. The research findings indicate that although the PPATS team has successfully developed an innovative data collection system through the PASTI BERAksi application, its effectiveness remains suboptimal. The main obstacle lies in the data verification and validation process, which is hampered by the lack of honorarium funds for field officers and the lack of full program integration within the regional Budget Planning Document (DPA). The study's conclusions emphasize that successful TOS management requires strengthened cross-sectoral coordination, adequate budget support, and more robust policy integration to ensure the sustainability of the program for returning children to school.

Keywords: *Team Performance Effectiveness, Handling of Children Not in School*

PENDAHULUAN

Pendidikan memegang peranan yang sangat sentral dan fundamental dalam menentukan arah kemajuan sebuah bangsa, karena kualitas sumber daya manusia merupakan aset terbesar

Copyright (c) 2025 SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS

negara. Maju atau mundurnya peradaban suatu negara sering kali dapat diukur dari seberapa baik sistem pendidikan yang dijalankannya (Pujiarti et al., 2024; Siregar & Ansar, 2025). Pendidikan bukan sekadar proses transfer pengetahuan, melainkan kekuatan utama untuk membangun karakter dan martabat bangsa di mata dunia. Dalam konteks Indonesia, komitmen terhadap pendidikan telah dituangkan secara tegas dalam konstitusi dan berbagai regulasi turunannya, yang mewajibkan negara untuk menjamin akses pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali (Pitriyani, 2023). Kebijakan wajib belajar dirancang untuk memastikan pemerataan kesempatan, sehingga setiap anak dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Namun, di balik cita-cita luhur tersebut, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan besar berupa hambatan aksesibilitas dan fenomena putus sekolah yang masih membayangi. Upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menuntut perhatian serius terhadap berbagai kendala yang menghambat partisipasi sekolah, demi tercapainya kualitas penduduk yang berdaya saing tinggi (Heriyadi et al., 2025; Tibr et al., 2025).

Sebagai kebutuhan dasar manusia, pendidikan pada hakikatnya bersifat terbuka dan tidak dapat dipisahkan dari ekosistem sosial masyarakat. Sebuah sistem pendidikan tidak akan dapat berjalan efektif jika ia mengisolasi diri dan menjadi menara gading yang terpisah dari realitas lingkungan sekitarnya. Pendidikan sejatinya adalah tanggung jawab kolektif yang melibatkan sinergi harmonis antara tri sentra pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik itu perubahan sosial maupun pergeseran nilai, pasti akan memberikan dampak langsung terhadap proses pendidikan itu sendiri (Rahmawati et al., 2024; Ramadhwan et al., 2025). Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan individu sepanjang hayat (*lifelong learning*) (Sae, 2023; Unisa & Azzahra, 2025). Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada seberapa kuat dukungan lingkungan dalam menciptakan atmosfer yang kondusif bagi pertumbuhan anak. Keterlibatan aktif masyarakat dan orang tua menjadi kunci untuk memastikan bahwa proses pembelajaran tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun akses pendidikan dijamin oleh undang-undang, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang beragam menjadi penentu utama keberlanjutan pendidikan seorang anak. Kesenjangan ekonomi keluarga sering kali menjadi tembok penghalang yang sulit ditembus bagi sebagian masyarakat untuk mengakses pendidikan jenjang yang lebih tinggi (Anwar, 2022; Fahrurrozi et al., 2022; Subiyantoro, 2022). Tidak semua keluarga memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk menopang biaya pendidikan, baik biaya langsung maupun tidak langsung. Akibatnya, faktor ekonomi sering kali mendominasi keputusan orang tua untuk memberhentikan anaknya dari sekolah demi membantu perekonomian keluarga. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar pendidikan ini menciptakan disparitas kualitas sumber daya manusia antar golongan masyarakat. Kondisi ini menegaskan bahwa stabilitas ekonomi keluarga berbanding lurus dengan peluang anak untuk menuntaskan wajib belajar. Jika masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan tidak diatasi, maka visi untuk menciptakan pemerataan pendidikan akan sulit terwujud, dan lingkaran setan kemiskinan akan terus berputar melalui rendahnya tingkat pendidikan generasi penerus.

Fenomena anak putus sekolah merupakan masalah kompleks yang dipicu oleh akumulasi berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri anak (*internal*) maupun dari lingkungan luar (*external*). Dari sisi internal, rendahnya motivasi belajar dan ketidaktahuan akan pentingnya masa depan sering kali membuat anak kehilangan minat untuk bersekolah. Sementara dari sisi eksternal, selain tekanan ekonomi, ketidakharmonisan hubungan dalam keluarga dan pengaruh lingkungan pergaulan yang negatif turut memberikan kontribusi signifikan. Di era modern ini, tantangan semakin bertambah dengan hadirnya perkembangan

teknologi digital yang tidak terkendali, yang terkadang mengalihkan fokus anak dari kewajiban akademisnya. Secara terminologis, kelompok rentan ini dikategorikan sebagai Anak Tidak Sekolah (ATS), yang mencakup mereka yang tidak pernah sekolah, putus di tengah jalan, atau tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Selain itu, terdapat pula kategori Anak Berisiko Putus Sekolah (ABPS), yaitu mereka yang masih terdaftar namun menghadapi tekanan situasi yang berpotensi besar memaksa mereka untuk berhenti sekolah sewaktu-waktu.

Untuk mengatasi permasalahan kompleks tersebut, diperlukan intervensi pemerintah melalui kebijakan publik yang tepat sasaran dan terencana. Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan strategis yang dirumuskan pemerintah untuk merespons masalah spesifik demi kepentingan khalayak luas. Namun, sebuah kebijakan hanya akan menjadi dokumen tertulis semata tanpa adanya administrasi publik yang berperan sebagai mesin penggerak implementasinya. Administrasi publik berfungsi untuk mengeksekusi kebijakan tersebut melalui organisasi pemerintah secara kolaboratif, efisien, dan efektif. Dalam konteks penanganan anak putus sekolah, administrasi publik menuntut adanya kerja sama terorganisir antar lembaga dan pelibatan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*). Meskipun pemerintah memegang otoritas regulasi, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada peran aktif aktor-aktor pelaksana di lapangan. Proses ini membutuhkan integrasi yang kuat antara perumusan tujuan yang jelas dan eksekusi operasional yang konsisten, guna memastikan bahwa setiap program yang diluncurkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi penurunan angka putus sekolah.

Dalam lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, upaya peningkatan kualitas pendidikan tecermin dari indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang menjadi komponen utama Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*). Meskipun data statistik menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, pertumbuhan angka partisipasi pendidikan tersebut masih tergolong lambat dan belum sepenuhnya optimal. Pemerintah daerah telah merespons hal ini dengan membentuk Tim Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah sebagai wujud keseriusan dalam menekan angka ATS. Tim ini diharapkan menjadi ujung tombak dalam mengurai benang kusut permasalahan pendidikan di tingkat lokal. Namun, keberadaan tim koordinasi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana efektivitas kinerja mereka dalam menjawab tantangan di lapangan. Kesenjangan antara target ideal penurunan angka putus sekolah dengan realitas capaian yang ada menuntut adanya evaluasi mendalam terhadap mekanisme kerja, strategi, dan hambatan yang dihadapi oleh tim tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini hadir dengan nilai kebaruan (*novelty*) yang berfokus pada analisis efektivitas organisasi publik dalam menangani isu spesifik pendidikan. Masalah utama yang diangkat dalam artikel ini adalah bagaimana efektivitas kinerja Tim Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan mandatnya. Penelitian ini akan membedah efektivitas tersebut menggunakan indikator-indikator manajemen modern seperti kejelasan tujuan, ketepatan strategi, kematangan perencanaan, hingga ketersediaan sarana pendukung. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisis dan mengukur sejauh mana tim ini mampu bekerja secara efektif dalam menekan laju angka anak tidak sekolah. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan gambaran komprehensif mengenai performa tim koordinasi, sekaligus memberikan rekomendasi strategis bagi perbaikan tata kelola penanganan anak putus sekolah, sehingga hak pendidikan bagi setiap anak di Sulawesi Selatan dapat terpenuhi secara maksimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*) untuk mengevaluasi secara mendalam efektivitas kinerja Tim Koordinasi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS). Pendekatan kualitatif dipilih karena urgensi untuk memahami fenomena sosial yang kompleks terkait anak tidak sekolah yang tidak hanya dapat diukur melalui angka statistik semata, melainkan memerlukan pemahaman holistik mengenai dinamika kebijakan dan implementasi di lapangan. Lokasi penelitian dipusatkan di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan fokus spesifik pada kabupaten/kota yang memiliki prevalensi Anak Tidak Sekolah (ATS) tertinggi dan memerlukan intervensi mendesak. Melalui metode studi kasus, peneliti berupaya membedah unit analisis tunggal namun mendalam, yakni kinerja tim koordinasi dalam menjalankan mandatnya sesuai regulasi yang berlaku. Fokus utama kajian diarahkan pada bagaimana mekanisme kerja tim, strategi intervensi yang diterapkan, serta responsivitas organisasi terhadap tantangan penanganan ATS. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi realitas empiris di balik data angka, menghubungkan kebijakan di tingkat provinsi dengan eksekusi di tingkat daerah, serta memetakan kesenjangan antara rencana strategis nasional dengan kendala operasional yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan di wilayah tersebut.

Prosedur pengumpulan data dilakukan secara komprehensif melalui triangulasi teknik yang meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi guna menjamin validitas informasi. Wawancara mendalam ditujukan kepada informan kunci (*key informants*) yang dipilih secara *purposive*, meliputi pejabat struktural dan fungsional yang tergabung dalam Tim Teknis dan Tim Sekretariat PPATS, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Bappelitbangda, serta mitra pembangunan internasional. Interaksi ini bertujuan menggali perspektif subjektif mengenai mekanisme koordinasi, hambatan anggaran, dan efektivitas aplikasi sistem pendataan. Selain itu, peneliti melakukan observasi lapangan untuk mengamati secara langsung proses verifikasi dan validasi data ATS, serta dinamika pertemuan koordinasi tim. Langkah ini diperkuat dengan telaah dokumen strategis, yaitu menganalisis Rencana Aksi Daerah (RAD), laporan monitoring evaluasi, dan regulasi terkait seperti Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah. Kombinasi teknik ini dirancang untuk mendapatkan data empiris yang utuh, memotret alur kerja tim dari perencanaan hingga evaluasi, serta memastikan bahwa data yang dihimpun bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam konteks administrasi publik.

Analisis data dilaksanakan secara interaktif dan berkesinambungan, dimulai sejak pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan akhir untuk mengukur indikator keberhasilan tim. Teknik analisis mengacu pada model kualitatif yang meliputi tiga alur kegiatan utama: kondensasi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap kondensasi, peneliti memilah, menyederhanakan, dan memfokuskan data mentah dari hasil wawancara dan catatan lapangan yang relevan dengan indikator efektivitas program, seperti ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan pencapaian tujuan reintegrasi sekolah. Data yang telah terstruktur kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang logis untuk memudahkan pemahaman terhadap pola kinerja tim PPATS dan kendala struktural yang dihadapi, seperti masalah honorarium petugas lapangan dan integrasi dokumen anggaran. Tahap akhir melibatkan penarikan kesimpulan yang didasarkan pada temuan bukti yang kuat, di mana interpretasi peneliti dikonfirmasi kembali kebenarannya melalui validasi silang antar sumber data. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan ketekunan pengamatan, memastikan bahwa kesimpulan mengenai efektivitas tim PPATS bukan sekadar opini, melainkan hasil sintesis data yang akurat mengenai upaya pengembalian anak ke bangku sekolah di Sulawesi Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

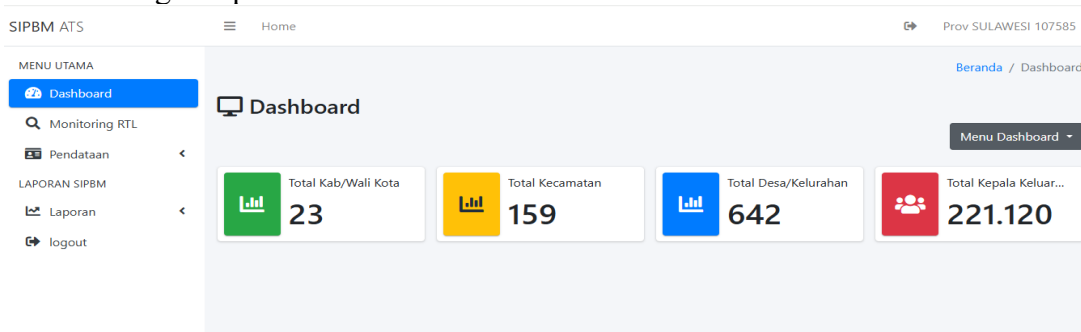
1. Hambatan Aksesibilitas dan Koordinasi dalam Pengumpulan Data Lapangan

Selama proses penelitian mengenai efektivitas kinerja Tim Koordinasi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS) di Provinsi Sulawesi Selatan, peneliti dihadapkan pada sejumlah kendala struktural yang cukup kompleks, terutama berkaitan dengan aksesibilitas terhadap sumber informasi utama. Tantangan terbesar adalah sulitnya membangun koordinasi yang efektif dengan para informan kunci yang tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kesibukan pejabat yang sangat tinggi, ditambah dengan jadwal kegiatan dinas yang padat dan sering berubah-ubah, menyebabkan proses penjadwalan wawancara menjadi sangat alot dan memakan waktu jauh lebih lama dari estimasi awal. Selain itu, sebaran geografis informan yang tidak hanya terpusat di kantor provinsi tetapi juga berada di kabupaten/kota dengan jarak tempuh yang signifikan, menambah lapisan kesulitan logistik bagi peneliti untuk mendapatkan data primer secara langsung dan mendalam.

Kendala berikutnya yang cukup krusial adalah inkonsistensi dan fragmentasi data yang diperoleh dari berbagai instansi terkait. Temuan di lapangan menunjukkan adanya disparitas angka yang cukup mencolok, khususnya mengenai jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) yang teridentifikasi dibandingkan dengan data anak yang berhasil dikembalikan ke bangku pendidikan. Masalah ini diperparah oleh fakta bahwa tidak semua OPD memiliki mekanisme dokumentasi yang rapi terkait proses verifikasi dan validasi data lapangan. Penggunaan aplikasi "PASTI BERAKSI", yang seharusnya menjadi basis data terintegrasi, ternyata belum diimplementasikan secara merata di seluruh perangkat daerah. Akibatnya, data yang tersedia sering kali tidak sinkron satu sama lain, menyulitkan proses triangulasi dan verifikasi kebenaran data, yang pada akhirnya mempengaruhi akurasi analisis mengenai efektivitas program secara keseluruhan.

2. Tantangan Validitas Informasi dan Kapasitas Teknis Informan

Dalam upaya menggali informasi yang mendalam, peneliti juga menghadapi tantangan terkait sensitivitas isu dan keterbukaan para informan. Terdapat kecenderungan kuat di kalangan informan untuk memberikan jawaban yang bersifat normatif, formal, dan aman, terutama ketika ditanya mengenai hambatan internal seperti lemahnya koordinasi antar-instansi atau ketiadaan anggaran operasional bagi pendata di lapangan. Ketakutan akan persepsi negatif terhadap kinerja institusi atau kekhawatiran dianggap mengkritik kebijakan atasan membuat banyak informasi krusial mengenai kegagalan atau hambatan program menjadi tertutupi. Hal ini memaksa peneliti untuk bekerja ekstra keras dalam menggali makna tersirat di balik pernyataan formal dan mencari sumber alternatif untuk memvalidasi kondisi riil yang sering kali berbeda dengan laporan administratif di atas kertas.



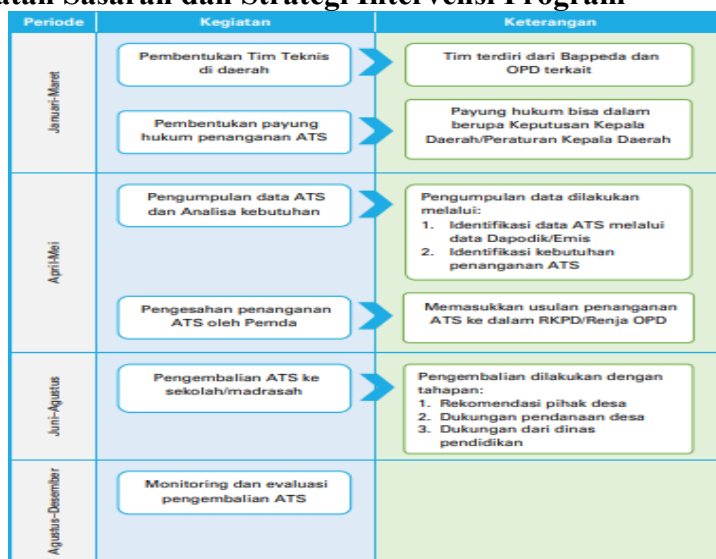
Gambar 1. Dashboard Pasti Beraksi

Berdasarkan gambar 1 selain aspek transparansi, kendala teknis terkait pemahaman sistem juga menjadi penghambat yang signifikan dalam penelitian ini. Peneliti menemukan

Copyright (c) 2025 SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS

bahwa tidak semua informan, khususnya di level pelaksana lapangan seperti pendata desa dan kelurahan, memahami secara utuh mekanisme kerja aplikasi PASTI BERAksi maupun alur koordinasi Tim PPATS secara komprehensif. Keterbatasan literasi digital dan pemahaman prosedural ini menyebabkan informasi yang diberikan sering kali bersifat dangkal atau tidak menyentuh substansi teknis yang dibutuhkan. Akibatnya, peneliti harus melakukan proses konfirmasi berulang kali untuk memastikan validitas data, yang secara otomatis memperpanjang durasi penelitian dan menambah kompleksitas dalam menyusun analisis yang akurat mengenai efektivitas implementasi teknologi dalam program penanganan anak tidak sekolah ini.

3. Analisis Ketepatan Sasaran dan Strategi Intervensi Program



Gamabr 2. Konsep kegiatan penanganan ATS (Timeline) berdasarkan Staranas dan praktik Baik

Berdasarkan gambar 2 Evaluasi terhadap dimensi ketepatan sasaran menunjukkan bahwa Tim Koordinasi PPATS telah berupaya keras untuk memastikan program ini menjangkau kelompok yang paling membutuhkan melalui pemanfaatan data empiris. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada akurasi identifikasi Anak Tidak Sekolah (ATS) yang dilakukan melalui aplikasi PASTI BERAksi, yang kemudian disandingkan dengan target Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang tertuang dalam Rencana Aksi Daerah. Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terlihat jelas dari pelibatan lintas sektor, mulai dari Bappelitbangda, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, hingga kemitraan strategis dengan UNICEF. Sinergi ini diformulasikan dalam inovasi kolaboratif yang bertujuan untuk meminimalisir *error inclusion* dan *exclusion* dalam pendataan, memastikan bahwa intervensi pemerintah benar-benar jatuh kepada anak-anak yang putus sekolah karena faktor ekonomi, sosial, maupun budaya.

Meskipun demikian, temuan di lapangan juga mengindikasikan adanya tantangan dalam realisasi dukungan anggaran yang berdampak pada operasionalisasi target sasaran. Wawancara dengan pihak Bappelitbangda dan Dinas Pendidikan mengonfirmasi bahwa secara konseptual, sasaran program sudah sangat tepat karena mengintervensi anak usia wajib belajar yang berisiko. Namun, terdapat kendala teknis pada realisasi anggaran pendataan yang bersumber dari APBD, di mana dana yang dialokasikan sering kali mengalami keterlambatan pencairan atau bahkan belum terealisasi hingga pertengahan tahun berjalan. Hal ini tentu menghambat mobilitas tim verifikasi di lapangan dalam menjangkau sasaran yang tersebar di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Meski demikian, upaya kolaboratif dengan pemerintah

kabupaten/kota terus didorong untuk menutupi celah tersebut, memastikan bahwa identifikasi sasaran tetap berjalan meski di tengah keterbatasan sumber daya finansial.

4. Evaluasi Ketepatan Waktu dan Efisiensi Mekanisme Kerja

Dimensi ketepatan waktu menjadi indikator krusial dalam mengukur responsivitas Tim PPATS terhadap permasalahan anak putus sekolah. Analisis difokuskan pada kesesuaian antara durasi proses penanganan mulai dari pendataan awal, verifikasi, hingga pengembalian anak ke sekolah dengan *timeline* yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi PPATS. Berdasarkan wawancara dengan perwakilan UNICEF, mekanisme kerja tim telah diatur sedemikian rupa agar sinkron dengan kalender akademik, khususnya batas waktu *cut off* data pokok pendidikan (Dapodik) pada 31 Agustus setiap tahunnya. Ketaatan terhadap jadwal ini sangat vital karena jika pendataan dan verifikasi terlambat, maka anak yang berhasil diadvokasi tidak dapat terdaftar secara resmi dalam sistem pendidikan nasional pada tahun berjalan, yang berarti menunda hak pendidikan mereka selama satu tahun penuh.

Proses verifikasi yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa hingga kabupaten menunjukkan adanya upaya untuk mempercepat alur birokrasi penanganan. Konfirmasi data yang dilakukan langsung dengan mengundang orang tua dan anak di kantor desa merupakan strategi efisiensi waktu yang efektif untuk mendapatkan persetujuan dan komitmen kembali bersekolah secara instan. Siklus kerja yang dimulai dari pendataan pada Januari-Mei, rekonfirmasi pada Juni, hingga eksekusi pengembalian ke sekolah pada Juli-Agustus, dinilai sudah cukup sistematis. Namun, tantangan tetap ada dalam menjaga konsistensi pelaksanaan *timeline* ini di seluruh kabupaten/kota, mengingat variasi kapasitas tim daerah yang berbeda-beda. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada bulan Oktober menjadi mekanisme kontrol kualitas untuk memastikan bahwa setiap tahapan waktu tersebut dipatuhi dan kendala keterlambatan dapat segera diidentifikasi untuk perbaikan pada siklus tahun berikutnya.

5. Pencapaian Tujuan dan Efektivitas Kolaborasi Lintas Sektor

Indikator ketercapaian tujuan dinilai berdasarkan kemampuan Tim PPATS dalam menerjemahkan mandat Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah (Stranas ATS) menjadi aksi nyata di tingkat daerah. Pembentukan tim koordinasi melalui Surat Keputusan Gubernur menjadi landasan legalitas yang kuat untuk menyatukan gerak langkah berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Pembagian peran yang jelas antara Tim Teknis dan Tim Sekretariat memungkinkan fokus kerja yang lebih terarah: Tim Teknis berfokus pada validasi data dan strategi lapangan, sementara Tim Sekretariat menjaga ritme perencanaan dan pelaporan. Sinergi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem penanganan yang terpadu, menghindari tumpang tindih program, dan memastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan memiliki dampak yang terukur terhadap pengurangan angka anak putus sekolah di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, kinerja kolaboratif ini dinilai telah berjalan efektif, meskipun masih menghadapi berbagai dinamika lapangan. Indikator keberhasilan yang diukur melalui "5 Aksi" regulasi, pendataan, layanan pengembalian, pembinaan, dan advokasi menunjukkan progres yang positif. Wawancara dengan para pemangku kepentingan mengonfirmasi bahwa program ini berkontribusi nyata terhadap peningkatan Angka Partisipasi Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Meskipun secara administratif dan koordinatif masih terdapat ruang untuk perbaikan, model kerja sama yang dibangun, di mana setiap OPD mengambil peran spesifik sesuai tugas dan fungsinya, telah berhasil menciptakan *sense of ownership* bersama terhadap masalah pendidikan ini. Pertemuan koordinasi rutin yang dilakukan per semester menjadi forum vital untuk menjaga akuntabilitas kinerja dan memastikan bahwa tujuan besar mewujudkan "Wajib Belajar 13 Tahun" tetap berada di jalur yang benar.

Pembahasan

Analisis efektivitas kinerja Tim Koordinasi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan adanya dinamika kompleks antara mandat regulasi dengan realitas operasional di lapangan. Meskipun pembentukan tim telah didasari oleh legalitas yang kuat melalui Surat Keputusan Gubernur serta merujuk pada Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah, implementasinya masih menghadapi hambatan struktural yang signifikan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa birokrasi yang kaku dan kesibukan pejabat di berbagai Organisasi Perangkat Daerah sering kali menjadi penghalang utama dalam koordinasi lintas sektor (Rande & Asmarani, 2025). Kesulitan dalam mengakses informan kunci dan menyelaraskan jadwal dinas mengindikasikan bahwa mekanisme komunikasi internal belum sepenuhnya cair. Hal ini berimplikasi pada lambatnya pengambilan keputusan strategis yang seharusnya bersifat responsif terhadap kebutuhan anak tidak sekolah, sehingga tujuan untuk menciptakan ekosistem penanganan yang terpadu masih membutuhkan penguatan komitmen dari level pimpinan hingga pelaksana teknis (Miftah & Prasetyo, 2024; Rande & Asmarani, 2025).

Aspek krusial yang menjadi sorotan utama dalam evaluasi ini adalah integritas dan integrasi data sebagai basis intervensi kebijakan. Penggunaan aplikasi *PASTI BERAKSI* yang dirancang sebagai instrumen integrasi data ternyata belum berfungsi optimal karena adanya fragmentasi implementasi di tingkat daerah. Disparitas data antara satu instansi dengan instansi lain menunjukkan lemahnya tata kelola administrasi dan ketiadaan standar validasi yang seragam. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa tidak semua perangkat daerah melakukan pemutakhiran data secara *real-time*, sehingga menyulitkan proses triangulasi informasi. Ketidaksinkronan ini memiliki implikasi serius terhadap akurasi kebijakan, di mana potensi *error inclusion* dan *exclusion* dalam penetapan sasaran penerima manfaat menjadi lebih besar. Oleh karena itu, tantangan teknis ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan hambatan fundamental yang dapat mendistorsi potret kondisi pendidikan yang sebenarnya di wilayah tersebut (Arini et al., 2025; Ninghardjanti et al., 2023; Ratnawati et al., 2025).

Validitas informasi yang diperoleh selama proses monitoring dan evaluasi juga dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia dan budaya organisasi yang cenderung tertutup. Penelitian menemukan adanya kecenderungan informan untuk memberikan jawaban yang bersifat normatif demi menjaga citra institusi, yang pada akhirnya menutupi akar permasalahan yang sesungguhnya. Fenomena ini diperumit oleh rendahnya literasi digital di kalangan petugas lapangan, khususnya di tingkat desa dan kelurahan, yang belum memahami mekanisme kerja sistem aplikasi secara komprehensif. Ketidapahaman prosedural ini menyebabkan data yang diinput sering kali tidak valid atau tidak lengkap, sehingga memerlukan proses verifikasi berulang yang memakan waktu. Keterbatasan kapasitas teknis ini menegaskan perlunya pelatihan intensif dan pendampingan berkelanjutan agar para pelaksana di tingkat akar rumput tidak hanya sekadar menggugurkan kewajiban administratif, tetapi benar-benar memahami substansi dari pendataan yang mereka lakukan (Irnowati et al., 2025; Jailani et al., 2025; Liska et al., 2025).

Ditinjau dari aspek ketepatan sasaran, strategi intervensi yang dilakukan secara konseptual telah berada di jalur yang tepat dengan memprioritaskan anak usia wajib belajar yang berisiko putus sekolah. Namun, efektivitas penargetan ini terganjal oleh kendala realisasi anggaran yang sering kali terlambat atau tidak sesuai dengan perencanaan awal. Keterlambatan pencairan dana operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara langsung menghambat mobilitas tim verifikasi dalam menjangkau wilayah *Tertinggal, Terdepan, dan Terluar* (3T). Akibatnya, meskipun target sasaran telah teridentifikasi secara jelas dalam dokumen perencanaan, eksekusi intervensi di lapangan menjadi tidak maksimal karena

ketiadaan dukungan logistik yang memadai. Kesenjangan antara perencanaan program yang ideal dengan dukungan finansial yang minim ini menjadi catatan kritis bahwa komitmen politik dalam penanganan anak tidak sekolah harus dibarengi dengan komitmen anggaran yang nyata dan tepat waktu (Nurjito & Supardal, 2025; Salim & Bambang, 2025; Sari et al., 2025).

Indikator ketepatan waktu menjadi parameter vital dalam mengukur keberhasilan pengembalian anak ke bangku pendidikan, mengingat ketatnya jadwal akademik nasional. Mekanisme kerja yang disinkronkan dengan batas waktu *cut off* Data Pokok Pendidikan pada akhir Agustus menuntut kedisiplinan tinggi dari seluruh elemen tim koordinasi. Meskipun siklus kerja mulai dari pendataan hingga eksekusi pengembalian siswa telah dirancang sistematis, variasi kapasitas antar-kabupaten menyebabkan ketimpangan dalam kecepatan eksekusi. Keterlambatan dalam proses verifikasi di satu daerah dapat berdampak pada hilangnya kesempatan anak untuk terdaftar pada tahun ajaran berjalan, yang berarti menunda hak pendidikan mereka selama satu tahun. Oleh sebab itu, efisiensi mekanisme birokrasi dan percepatan alur validasi data menjadi prasyarat mutlak agar intervensi yang dilakukan tidak hanya tepat sasaran tetapi juga tepat momentum sesuai dengan kalender pendidikan.

Kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, lembaga internasional seperti UNICEF, dan organisasi masyarakat sipil telah berhasil menciptakan *sense of ownership* bersama dalam penanganan isu pendidikan ini. Pembagian peran yang spesifik antara tim teknis dan tim sekretariat terbukti efektif dalam memecah beban kerja dan menjaga fokus pada indikator kinerja masing-masing. Keberhasilan dalam menjalankan "5 Aksi" penanganan anak tidak sekolah menunjukkan bahwa sinergi antar-lembaga mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan Angka Partisipasi Sekolah. Meskipun demikian, keberlanjutan model kolaborasi ini sangat bergantung pada konsistensi komunikasi dan forum evaluasi rutin. Tanpa adanya *monitoring* yang ketat dan kepemimpinan yang kuat dalam mengorkestrasi berbagai kepentingan sektoral, kolaborasi ini rentan terjebak dalam formalitas seremonial belaka tanpa menghasilkan dampak perubahan sistemik yang berjangka panjang.

Secara keseluruhan, analisis ini menyimpulkan bahwa efektivitas kinerja Tim Koordinasi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah di Sulawesi Selatan masih berada pada taraf moderat dengan berbagai catatan perbaikan. Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan regulasi dan aplikasi teknologi semata, melainkan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, akuntabilitas data, serta dukungan anggaran yang konsisten. Implikasi dari temuan ini menuntut adanya reformasi dalam tata kelola data pendidikan daerah menuju satu data yang terintegrasi penuh. Selain itu, diperlukan pergeseran paradigma dari pendekatan yang bersifat administratif-birokratis menjadi pendekatan yang lebih berorientasi pada hasil dan dampak nyata di lapangan. Jika hambatan-hambatan fundamental ini tidak segera diatasi, target percepatan Wajib Belajar 13 Tahun dan visi Generasi Emas 2045 akan sulit tercapai secara optimal di tingkat daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan penjelasan hasil penelitian, efektivitas kinerja Tim Koordinasi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS) Provinsi Sulawesi Selatan, maka penulis menyimpulkan bahwa; pencapaian yang belum optimal meskipun telah menggunakan pedoman Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah (STRANAS ATS) sebagai acuan kerja. Dari aspek ketepatan sasaran, Tim PPATS telah berhasil mengidentifikasi kelompok Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Beresiko Putus Sekolah (ABPS) dengan tepat melalui inovasi aplikasi PASTI BERAksi yang dikembangkan sejak tahun 2019 dan diperluas ke 24 kabupaten/kota secara bertahap. Namun dari segi ketepatan waktu, meskipun telah ditetapkan timeline yang jelas mulai dari pendataan (Januari-Mei), rekonformasi (Juni), pengembalian ke sekolah (Juli-

Agustus), hingga evaluasi (Oktober), pelaksanaannya masih terkendala oleh belum terealisasinya anggaran honor pendata hingga bulan September dan lemahnya integrasi program ke dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA). Dalam hal tercapainya tujuan, Tim PPATS yang dibentuk melalui SK Gubernur Nomor 534/II/Tahun 2021 telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan pembagian kerja yang jelas antara Tim Teknis dan Tim Sekretariat, serta melakukan monitoring evaluasi secara periodik menggunakan indikator 5 Aksi (Regulasi dan Sumber Daya, Pendataan, Layanan, Pembinaan, dan Advokasi). Program ini memberikan kontribusi positif terhadap penurunan angka ATS dan peningkatan partisipasi sekolah, namun efektivitas kinerja secara keseluruhan masih memerlukan peningkatan koordinasi dan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah, pemerataan pemanfaatan sistem data, serta penguatan kapasitas SDM untuk mencapai target wajib belajar 13 tahun sesuai visi Indonesia Emas 2045.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. S. (2022). Ketimpangan aksesibilitas pendidikan dalam perspektif pendidikan multikultural. *Foundasia*, 13(1), 1. <https://doi.org/10.21831/foundasia.v13i1.47444>
- Arini, A., Ratnawati, E., Komariyah, L., Subagiyo, L., & Warman, W. (2025). Evaluasi manajemen pendidikan di madrasah negeri di Kalimantan Timur: Peran sistem informasi dalam penjaminan mutu pendidikan. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 446. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5726>
- Fahrurrozi, F., Sari, Y., & Wiguna, P. (2022). Studi literatur: Pengaruh status sosial ekonomi orang tua terhadap hasil belajar siswa sekolah dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(4), 5472. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i4.3009>
- Heriyadi, H., Rahmi, I. G. A. K., Sulistiawan, E., Kusmiran, A. H., & Suriansyah, A. (2025). Peran komunitas dalam meningkatkan mutu pendidikan di SDK Santa Maria. *Manajerial: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 5(2), 444. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i2.6201>
- Irnawati, I., Rispawati, R., Alqadri, B., & Atsar, A. (2025). Implementasi Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(1), 266. <https://doi.org/10.51878/social.v5i1.5149>
- Jailani, J., Mirza, T., & Fahlevi, A. H. (2025). Analisis pengembangan sumber daya manusia (SDM) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Prabumulih. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(3), 1198. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i3.6515>
- Liska, U., Novaria, E., Farhat, F., Suhaila, S., & Yusuf, A. (2025). Penguatan kapasitas relawan bencana melalui posko pelatihan pengetahuan kebencanaan (Pas Wacana P3K) di Kabupaten OKU Selatan. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(3), 1380. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i3.6925>
- Miftah, M., & Prasetyo, A. (2024). Speed up uneducated children's education in Central Java through community learning. In *Advances in social science, education and humanities research* (p. 118). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-273-6_15
- Ninghardjanti, P., Murtini, W., Hindrayani, A., & Sangka, K. B. (2023). Evaluation of the Smart Indonesia Program as a policy to improve equality in education. *Sustainability*, 15(6), 5114. <https://doi.org/10.3390/su15065114>
- Nurjito, A. S., & Supardal, S. (2025). Strategi penanganan anak tidak sekolah (P-ATS) di Kabupaten Magelang: Meningkatkan akses dan kesadaran pendidikan. *Social:*

- Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(3), 1006.
<https://doi.org/10.51878/social.v5i3.6961>
- Pitriyani, P. (2023). Pengawasan dana pendidikan. *Cendekia Inovatif dan Berbudaya*, 1(1), 26.
<https://doi.org/10.59996/cendib.v1i1.150>
- Pujiarti, T., Putra, A., & Astuti, K. P. (2024). Faktor penghambat pembelajaran membaca permulaan pada siswa sekolah dasar. *Jurnal Evaluasi dan Kajian Strategis Pendidikan Dasar*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.54371/jekas.v1i1.322>
- Rahmawati, D., Yusuf, M., & Mubarak, M. (2024). Kerjasama antar ummat beragama dalam bidang pendidikan untuk mewujudkan generasi rahmatan lil alamin. *Learning: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(2), 174.
<https://doi.org/10.51878/learning.v4i2.2828>
- Ramadhoan, F., Masitha, D., & Haris, A. (2025). Implementasi karakter tanggung jawab melalui mata pelajaran PPKn pada kelas 2 SDN 51 Rite Kota Bima. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 661. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5641>
- Rande, S., & Asmarani, M. (2025). Breaking the chain of violence: A study of policy implementation on child protection in Samarinda City, Indonesia. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 4(2), 48. <https://doi.org/10.52970/grlspr.v4i2.1228>
- Ratnawati, E., Kristiyani, N., Warman, W., Bahzar, M., & Nurlaili, N. (2025). Transformasi digital di sekolah negeri pesisir: Kajian aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada implementasi Google for Education di SMP Negeri 1 Anggana. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(3), 1288. <https://doi.org/10.51878/social.v5i3.7315>
- Sae, S. Y. (2023). Pemanfaatan media pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas IX.2 SMP Negeri 1 Soe. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 3(2), 64. <https://doi.org/10.51878/social.v3i2.2408>
- Salim, M. N., & Bambang, B. (2025). Inovasi manajemen keuangan melalui kegiatan kewirausahaan (edupreneurship) sebagai upaya peningkatan mutu pembelajaran di MI. *Manajerial: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 5(4), 878.
<https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i4.7560>
- Sari, F. H., Andaryani, S., Hasanah, A. U., & Solha, S. (2025). Urgensi kebijakan pemerintah dalam edukasi pencegahan kekerasan seksual pada siswa sekolah dasar. *Manajerial: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 5(3), 821.
<https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i3.7323>
- Siregar, M. D., & Ansar, A. (2025). Karakterisasi program pendidikan non formal di KB dan TK Iman Al Qurbah. *Manajerial: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 5(4), 961. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i4.7646>
- Subiyantoro, S. (2022). Family management perspective Islamic education (A case study in Southeast Sulawesi and Yogyakarta). *Tsaqafah*, 18(1), 35.
<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v18i1.7903>
- Tibr, T. U., Fauzan, F., & Nurmaliyah, Y. (2025). Penerapan Kurikulum Merdeka pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Sahid Jakarta. *Learning: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(3), 1442.
<https://doi.org/10.51878/learning.v5i3.6652>
- Unisa, L., & Azzahra, S. F. (2025). Problematik implementasi penguatan potensi siswa dalam Kurikulum Merdeka di sekolah dasar. *Manajerial: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 5(4), 931. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i4.7835>